PERKEMBANGAN DAN KONTRIBUSI SUMBER-SUMBER PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) TERHADAP TOTAL PNBP BANDAR UDARA KASIGUNCU POSO

Sudarto Usuli¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso
Email : sudarto@unsimar.ac.id

Ni Made Alris Malaini²

²Mahasiswa S1 Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan besarnya kontribusi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap Total PNBP pada Bandar Udara Kasiguncu Poso. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sampel yang digunakan adalah data keuangan bandar udara Kasiguncu tahun 2013-2017. Data dianalisis dengan membandingkan data realisasi sumber-sumber penerimaan PNBP.

Hasil penelitian menunjukkan Perkembangan PNBP di Kantor Bandar Udara Kasiguncu Poso dari tahun ketahun mengalami kenaikan Tahun 2013 ke tahun 2014 PNBP naik sebesar Rp 128.179.760 atau berkembang sebesar 86,61%. Kemudian perkembangan PNBP tahun 2015 terhadap tahun 2014 sebesar Rp. 66.234.562,- atau naik sebesar 23,98%. Perkembangan PNBP tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar Rp. 248.383.337,- atau naik sebesar 72,54%. Dan perkembangan PNBP tahun 2017 terhadap tahun 2016 sebesar Rp. 33.916.484,- atau naik sebesar 5,74%. Kontribusi sumber-sumber penerimaan terhadap total PNBP secara keseluruhan sejak tahun 2013-2017, PJP2U memberikan kontribusi kepada PNBP sebesar 64,20%. Disusul oleh pos penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yakni sebesar 5,47%, Pendapatan Lain-lain sebesar 5,42%. Sewa Penggunaan Ruang 4,54%, Jasa Pelayanan Counter Pelaporan 3,87%, PJP4U 3,79%, Penerimaan Pas Masuk Bandara 3,75%, Sementara sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi di bawah 3%.

Kata Kunci: Kontribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak,

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mempunyai banyak sumber penerimaan negara yang digunakan untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 1.759,3 triliun. Dari angka tersebut, pendapatan pemerintah masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan dan gaji pegawai. Sebesar 85,6 persen anggaran pendapatan negara berasal dari pajak. Sekitar 14,3 persen berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan 0,1 persen berasal dari hibah.

Menurut UU no. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan Negara adalah PNBP dari lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Semua kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan

Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target PNBP yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga kementerian yang mengatur dan mengelola PNBP adalah Kementerian Perhubungan, dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif PNBP di Kementerian Perhubungan.

Di Kementerian Perhubungan itu sendiri terdapat berbagai jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengatur dan mengelola PNBP dan dituntut untuk dapat menghasilkan PNBP semaksimal mungkin. Diantaranya adalah PT. Angkasa Pura I yang mencakup bandar udara di wilayah tengah dan timur Indonesia, dan PT Angkasa Pura II, yang mencakup bandar udara daerah barat di Indonesia.

Dalam merealisasikan pelaksanaan otoritas bandar udara sebagai BUMN, maka sumber pembiayaan pengelolaan bandara tergantung kepada peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan operasional bandara sebagai badan layanan publik. Bandar udara harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari pendapatan sendiri berupa PNBP sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan. Tak terkecuali bandar udara Kasiguncu yang berada di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah.

Perkembangan terakhir bandar udara Kasiguncu Poso sejak tahun 2011 perlahan-lahan mulai memperbaiki infrastruktur bandara serta perbaikan pengelolaan keuangannya. Upaya ini dilakukan agar dapat meningkatkan sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak. Secara umum selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, pendapatan Bandara Kasiguncu mengalami kenaikan, namun dalam realisasi penerimaan dari masing-masing sumber mengalami pasang surut.

B. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Bandar Udara Kasiguncu Poso dari tahun 2013 sampai dengan 2017?
2. Seberapa besar kontribusi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap total PNBP pada Bandar Udara Kasiguncu Poso dari tahun 2013 sampai dengan 2017?

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 mengatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan salah satunya penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang di luar pendapatan perpajakan,

bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/lembaga (Hartoyo, 1999).

1. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku umum di semua departemen dan lembaga menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 terdiri dari :
 - a) Penerimaan kembali anggaran (sisa anggaran rutin dan sisa anggaran pembangunan)
 - b) Penerimaan hasil penjualan barang/kekayaan negara.
 - c) Penerimaan hasil penyewaan barang/kekayaan negara.
 - d) Penerimaan hasil penyimpanan uang negara (jasa giro).
 - e) Penerimaan ganti rugi atas kerugian negara (Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan).
 - f) Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah.
 - g) Penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang.
2. Jenis-jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang bersifat fungsional meliputi:
 - a) Penerimaan dari penyelenggaraan pendidikan
 - Penerimaan uang pendidikan.
 - Penerimaan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan.
 - Penerimaan uang ujian untuk menjalankan praktek.
 - Penerimaan pendidikan lainnya.
 - b) Penerimaan dari kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi perguruan tinggi
 - c) Penerimaan dari hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi.

B. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor Perhubungan Udara

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009, jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan lebih khusus pada sektor perhubungan udara, yaitu :

1. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP) :
 - a) Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh UPT
 - b) Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh UPT
 - c) Pelayanan Jasa Penerbangan Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I dan II
 - d) Pelayanan Jasa Penerbangan Luar Negeri yang diselenggarakan oleh PT (Persero) Angkasa Pura I dan II
2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
 - a). Dalam Negeri :
 - b). Luar Negeri:
3. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) :
 - a). Dalam Negeri

- b). Luar Negeri :
- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata (*Aviobridge*)
 - a). Penerbangan Dalam Negeri Per Blok on / Blok Off
 - b). Penerbangan Luar Negeri
- 5. Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (*check in counter*)
 - a). Penerbangan Dalam Negeri
 - b). Penerbangan Luar Negeri
- 6. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang di Bandar Udara
 - a) Barang Impor
 - b) Barang Ekspor
 - c) Barang antar bandara dalam negeri
- 7. Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi
 - a) Pesawat Udara dengan berat sampai dengan 100 ton
 - b) Pesawat Udara dengan berat di atas 100 ton
 - c) Bandara alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas (*Alternate Aerodrome Over Flying*).
- 8. Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara.
 - a) Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang per M2 per tahun.
 - b) Penyewa ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi).
 - c) Sewa Tanah Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus / Bandar Udara Kelas I / Bandar Udara Kelas II / Bandar Udara Kelas III , IV, dan satuan kerja
 - 1) Tanah Tidak diperkeras
 - 2) Tanah diperkeras
 - 3) Tanah kosong untuk agro bisnis
 - d) Pengusahaan pemasangan reklame melalui monitor Televisi selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi)
 - e) Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (*display*) produk.
 - f) Shooting film, pemotretan dan promosi
 - g) Pemakaian ruang tunggu khusus (*CIP/Commercial Important Person Room*)
 - h) Sewa Ruangan
 - 1) Di dalam Terminal / Di Luar Terminal Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus / Bandar Udara Kelas I / Bandar Udara Kelas II / Bandar Udara Kelas III , IV, dan satuan kerja
 - 2) Sewa Hanggar untuk Perbaikan Pesawat Udara
 - 3) Sewa Traktor Pendorong Pesawat/*Push Back Tractor*
 - i. Pemasangan Reklame

Terdiri dari: Kotak Neon (*Neon Box*) satu sisi pandang, Papan Reklame (*Billboard*), satu sisi pandang, Kereta Dorong (*Troly*) dua sisi pandang, Kursi satu sisi pandang, Asbak, Tempat Sampah, Baleho / Spanduk, Umbul- umbul, Stiker per M per bulan, Garbarata, Penempatan Booklet, Penempatan Brosur (*Leaflet*)
 - j. Tanda Masuk Kawasan Terbatas (Pas) di Bandar Udara

Seperti: Orang, Sedan/*Pick-Up/Jeep*, Sepeda Motor, Truk/*Bus/Tangki* dsb, Kontainer/ *Tronton* dan sejenis.
 - k. Pas masuk ke anjungan Pengantar (*waving galery*)
 - l. Tarif Penggunaan Air Minum, Listrik dan Telepon

3. Laporan realisasi PNBP

Laporan Realisasi PNBP triwulanan disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan yang bersangkutan berakhir dan laporan perkiraan realisasi PNBP triwulan IV disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 15 Agustus Tahun Anggaran berjalan.

Ketentuan tentang tatacara penyampaian laporan realisasi PNBP diatur dalam pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 yang menyebutkan bahwa: "tuan kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban penerimaan negara dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran yang dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif yaitu lebih menekankan pada kualitatif deskriptif, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (1994) dimana : salah satu ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, dengan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada.

B. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara atau *Interview*, peneliti lakukan untuk memperoleh data-data primer, yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan. Metode ini diaplikasikan untuk menggalidata dari Kepala Instansi/Pimpinan (Informan) yang terkait dengan keuangan/penerimaan bandara dan dipilih berdasarkan data yang dibutuhkan.
- b. Dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan data selain dengan wawancara (data dokumen), peneliti merujuk pada teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis berupa Peraturan Pemerintah, bahan-bahan laporan dan arsip-arsip yang tersedia.

C. Teknik Analisis Data.

Dalam mengolah data pada penelitian ini, metode analisis yang digunakan sebagai berikut :

1. Analisis Perkembangan PNBP masing-masing unit.

Analisis ini akan melihat besarnya perkembangan dari tahun ke tahun masing-masing unit penerimaan dalam PNBP dihitung secara persentase. (Soetrisno, 2001)

Analisis di atas dilakukan dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan PNBP tahun tertentu (i) dengan penerimaan tahun sebelumnya. dalam bentuk persentase (%). Pembahasan akan dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut di atas untuk setiap tahun pengamatan dari tahun 2013 s.d 2017. Hasil analisis tersebut akan dipaparkan untuk setiap tahun dan dihubungkan dengan kondisi yang ada pada saat analisis.

2. Analisis Kontribusi PNBP masing-masing Sumber Penerimaan terhadap total PNBP di Bandar Udara Kasiguncu Poso

Analisis kontribusi berguna untuk mengetahui besarnya kontribusi dan peranan penerimaan PNBP masing-masing unit di Bandar Udara Kasiguncu Poso terhadap Total PNBP. Data dianalisa dengan menggunakan rumus (T. Guritno, 1998) untuk masing-masing unit :

$$\text{Kontribusi PNBP} = \frac{\text{Jumlah PNBP (i)}}{\text{Total PNBP (i)}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Kemampuan keuangan Bandar Udara Kasiguncu Poso mencakup seluruh penerimaan yang tergambar dalam Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP yang merupakan sumber penerimaan rutin di Bandar Udara Kasiguncu terdiri atas :

- a. Sewa Rumah Dinas
- b. Sewa Ruangan Tunggu (CIP)
- c. Sewa Penggunaan Ruangan
- d. Sewa Penggunaan Tanah Bandar Udara
- e. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
- f. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
- g. Pelayanan Jasa Penerbangan (PJP)
- h. Jasa Pas Masuk Bandara
- i. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat
- j. Jasa Layanan Counter Pelaporan
- k. Konsesi atas Penguasaan Tanah dan Bangunan
- l. Konsesi atas Jasa Wrapping
- m. Konsesi atas Kegiatan Ground Handling
- n. Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemerintah
- o. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu
- p. Pengembalian Belanja Lainnya Tahun Anggaran Yang Lalu
- q. Pendapatan Jasa Lainnya
- r. Pendapatan Lain-lain

Realisasi penerimaan PNBP di Bandar Udara Kasiguncu Poso selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa adanya peningkatan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 besarnya realisasi PNBP adalah sebesar Rp. 147.994.168.-. Tahun 2014 meningkat hampir 2 kali lipat yakni sebesar Rp. 276.173.928,- dan pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi Rp. 342.408.490.- Tahun 2016 dan 2017 tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni masing-masing sebesar Rp.590.791.827 dan Rp. 624.708.311,-

B. Pembahasan

1. Analisis Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bandar Udara Kasiguncu Poso

Perkembangan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bandar Udara Kasiguncu Poso seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1
PERKEMBANGAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
DI KANTOR BANDARA KASIGUNCU POSO
tahun 2013 s.d. 2017

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan	Perkembangan	
1	2013	Rp 147.994.168	Rp -	0,00%
2	2014	Rp 276.173.928	Rp 128.179.760	86,61%
3	2015	Rp 342.408.490	Rp 66.234.562	23,98%
4	2016	Rp 590.791.827	Rp 248.383.337	72,54%
5	2017	Rp 624.708.311	Rp 33.916.484	5,74%

Sumber : Data diolah, 2018

Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kantor Bandar Udara Kasiguncu Poso dari tahun ketahun naik seiring dengan perkembangan aktivitas di bandar udara ini. Tahun 2013 ke tahun 2014 PNBP naik sebesar Rp 128.179.760 atau berkembang sebesar 86,61%. Kemudian perkembangan PNBP tahun 2015 terhadap tahun 2014 sebesar Rp. 66.234.562,- atau naik sebesar 23,98%. Perkembangan PNBP tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar Rp. 248.383.337,- atau naik sebesar 72,54%. Dan perkembangan PNBP tahun 2017 terhadap tahun 2016 sebesar Rp. 33.916.484,- atau naik sebesar 5,74%. Peningkatan target PNBP ini dilakukan oleh karena adanya peningkatan aktivitas di Bandar Udara Kasiguncu Poso seperti meningkatnya frekuensi penerbangan pesawat dari dan ke Bandar Udara Kasiguncu Poso sekarang menjadi setiap hari, tersedianya fasilitas ruangan maupun aset-aset bandara yang disewakan, adanya penerimaan dari hasil konsesi atas penguasaan tanah dan ruangan, konsesi atas jasa wrapping maupun konsesi atas kegiatan *Ground Handling*. Selain itu terdapat juga penerimaan jasa lainnya dan pendapatan lain-lain yang cukup mendongkrak penerimaan negara di Bandara Kasiguncu Poso.

2. Analisis Kontribusi Sumber-sumber PNBP di Kantor Bandar Udara Kasiguncu Poso

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di masing-masing sumber pendapatan PNBP di Bandar Udara Kasiguncu Poso mengalami peningkatan setiap tahunnya seiring dengan peningkatan pendapatan PNBP secara keseluruhan. Olehnya seberapa besar kontribusi masing-masing sumber penerimaan terhadap PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir, tabel berikut ini menampilkan sumber-sumber PNBP yang memberikan kontribusi terhadap PNBP Bandara Kasiguncu Poso, yaitu :

Tahun 2013, terlihat bahwa kontribusi PJP2U terhadap PNBP mendominasi penerimaan PNBP yaitu sebesar 68,77%. Selanjutnya penerimaan lainnya rata-rata masih berada dibawah 10%.

Tahun 2014, kontribusi PJP2U terhadap PNBPN masih mendominasi penerimaan PNBPN walaupun secara kuantitas mengalami sedikit kenaikan dari tahun 2013 namun kontribusinya mengalami penurunan yang tajam menjadi 40,39%. Hal ini dipicu adanya peningkatan penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yang cukup besar yakni mencapai 38,55% dari total penerimaan PNBPN. Sementara sumber-sumber penerimaan lainnya tetap masih berada dikisaran 0 – 10%.

Tahun 2015, kontribusi terbesar diberikan oleh PJP2U terhadap PNBPN yakni sebesar 71,47%. Hal ini terjadi seiring dengan peningkatan penerimaan PJP2U yang naik 200% lebih dibanding tahun sebelumnya. Sementara kontribusi dari sumber-sumber penerimaan lainnya yang mengalami kenaikan terlihat pada pos penerimaan Sewa Penggunaan Ruangan sebesar 5,72%, penerimaan Pelayanan Jasa Counter Pelaporan, Pas Masuk Bandara dan sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi kepada PNBPN berada di bawah 5%.

Tahun 2016, kontribusi terbesar masih diberikan oleh PJP2U terhadap PNBPN yakni sebesar 70,37%. Sementara yang memberikan kontribusi dikisaran 5-10% adalah Sewa Penggunaan Ruangan dan Pendapatan Jasa lainnya yakni masing-masing 5,93% dan 7,17%. Sedangkan pos penerimaan lainnya berada dikisaran 0 – 5%.

Tahun 2017, kontribusi PJP2U terhadap PNBPN turun menjadi 63,83% seiring dengan penurunan jumlah penerimaan PJP2U dari tahun sebelumnya Sumber penerimaan Pendapatan Lain-lain cukup meningkat hingga memberikan kontribusi sebesar 11,53% terhadap PNBPN. Hal ini disebabkan adanya penerimaan dari penggunaan listrik bandara yang sejak 2 tahun terakhir memberikan kontribusi yang cukup menggembarakan. Terdapat juga pos penerimaan yang memberikan kontribusi diatas 5% yakni konsesi atas kegiatan Ground Handling sebesar 5,72% dan Sewa Penggunaan Ruangan sebesar 5,65%. Sedangkan sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi kepada PNBPN berada di bawah 5%.

Secara keseluruhan sejak tahun 2013 s.d. 2017 PJP2U memberikan kontribusi terbesar terhadap PNBPN di Bandar Udara Kasiguncu Poso, disusul oleh penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah.

Secara keseluruhan sejak tahun 2013-2017 PJP2U telah memberikan kontribusi kepada PNBPN sebesar 64,20%. Disusul oleh pos penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yakni sebesar 5,47%, Pendapatan Lain-lain sebesar 5,42%. Sewa Penggunaan Ruangan 4,54%, Jasa Pelayanan Counter Pelaporan 3,87%, PJP4U 3,79%, Penerimaan Pas Masuk Bandara 3,75%, Sementara sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi di bawah 3%.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perkembangan PNBPN di Kantor Bandar Udara Kasiguncu Poso dari tahun ketahun mengalami kenaikan Tahun 2013 ke tahun 2014 PNBPN naik sebesar Rp 128.179.760 atau berkembang sebesar 86,61%. Kemudian perkembangan PNBPN tahun 2015 terhadap tahun 2014 sebesar Rp. 66.234.562,- atau naik sebesar 23,98%. Perkembangan PNBPN tahun 2016 terhadap tahun 2015 sebesar Rp. 248.383.337,- atau naik sebesar 72,54%. Dan perkembangan PNBPN tahun 2017 terhadap tahun 2016 sebesar Rp. 33.916.484,- atau naik sebesar 5,74%. Peningkatan reliasai PNBPN ini disebabkan oleh adanya peningkatan aktivitas di Bandar Udara Kasiguncu Poso seperti meningkatnya frekuensi penerbangan pesawat dari dan ke Bandar Udara Kasiguncu Poso sekarang menjadi setiap hari, tersedianya fasilitas ruangan maupun aset-aset bandara yang disewakan, adanya

penerimaan dari hasil konsesi atas penguasaan tanah dan ruangan, konsesi atas jasa wrapping maupun konsesi atas kegiatan Ground Handling. Selain itu terdapat juga penerimaan jasa lainnya dan pendapatan lain-lain yang cukup mendongkrak penerimaan negara di Bandara Kasiguncu Poso.

2. Kontribusi sumber-sumber penerimaan dalam PNBPN secara keseluruhan sejak tahun 2013-2017, PJP2U memberikan kontribusi kepada PNBPN sebesar 64,20%. Disusul oleh pos penerimaan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yakni sebesar 5,47%, Pendapatan Lain-lain sebesar 5,42%. Sewa Penggunaan Ruang 4,54%, Jasa Pelayanan Counter Pelaporan 3,87%, PJP4U 3,79%, Penerimaan Pas Masuk Bandara 3,75%, Sementara sumber-sumber penerimaan lainnya memberikan kontribusi di bawah 3%.

B. Saran

1. Untuk lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam PNBPN, maka pengelola Bandara Udara perlu meningkatkan pelayanan yang lebih optimal terhadap calon pengguna pesawat udara, supaya mereka akan lebih memilih jasa transportasi pesawat udara ketimbang menggunakan jasa transportasi darat maupun laut. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang disewakan, dan peningkatan pelayanan jasa penerbangan maupun sumber-sumber penerimaan lainnya yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap PNBPN.
2. Pengelola Bandar Udara Kasiguncu Poso mengupayakan untuk mengembangkan maupun meningkatkan pembangunan infrastruktur bandara / peningkatan sarana dan prasarana serta segera memperbaiki fasilitas yang sudah rusak agar bisa mendongkrak minat calon pengguna bandara tersebut sehingga dengan demikian akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan terhadap PNBPN di Bandar udara Kasiguncu Poso.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Penerimaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan
Abdul Wahab, Solichin, 2004, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineke Cipta, Jakarta
Bambang Riyanto, 2001. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
Darsono Prawironegoro, 2007. *Manajemen Keuangan*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Hartoyo Harry, 2010. *Membedah Pengelolaan Administrasi PBB dan BPHTB*, PT. Bina Aksara, Jakarta
Rustian Kamaruddin, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Kebijaksanaan Ekonomi*. Alumni, Bandung.
Soetrisno, 2001. *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*, Penerbit Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta.